BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Bandung yang sedang berjalan ketika sebelum penelitian ini dilakukan belum terintegrasi, artinya alur pengiriman antar sistem masih menggunakan metode konvensional.
2. Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah Kota Bandung dari beberapa tahapan pada penelitian ini dirancang terintegrasi melalui sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
3. Perancangan antar muka sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran dibuat dengan memperhatikan *user experience* karena pengguna dari sistem tidak seluruhnya terbiasa menggunakan suatu aplikasi.
4. Arsitektur jaringan dibuat menggunakan metode *client server* dan aplikasi yang berbasis *web*, sehingga tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran ini.
5. Aplikasi yang dikembangkan telah dilakukan pengujian, sehingga dapat dipastikan kesesuaian antara aplikasi dengan fungsi yang dibutuhkan dan juga peraturan perundang-udangan.

6. Pengimplementasian sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran di pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan mengembangkan aplikasi yang mencakup seluruh fungsi dari sistem informasi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

5.2. Saran

Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang penulis kembangkan ini tentunya masih banyak kekurangan salah satunya adalah masalah manajemen komponen dan rekening. Untuk itu penulis berharap, penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan kembali. Beberapa poin yang disarankan penulis diantaranya:

1. Penggunaan sistem musrenbang dan reses berbasiskan *mobile* agar memudahkan masyarakat dalam memberikan usulan dan juga pemanfaatan teknologi *sms gateway* dalam memberikan notifikasi apakah usulan diterima atau tidak.
2. Pengembangan manajemen rekening dan komponen terutama untuk komponen yang memiliki kategori HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) dan ASB (Analisis Standar Belanja) agar belanja lebih terperinci lagi.
3. Pengembangan sistem statistik yang menampilkan hasil dari perencanaan agar dapat terlihat bagaimana pergerakan anggaran belanja dan pendapat di setiap tahunnya.
4. Integrasi dengan sistem penatausahaan yang dibuat untuk melakukan pencairan anggaran serta integrasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi *double input* yang dilakukan SKPD dan juga untuk memastikan bahwa perencanaan terrealisasi dengan benar.

5. Integrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban pimpinan daerah agar terlihat bagaimana realisasi anggaran di akhir tahun dari apa yang telah direncanakan diawal.